

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH  
TERHADAP KEMISKINAN**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**IDA AYU NUGRAHENI**

**1116 28781**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**STIE YKPN YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP**  
**KEMISKINAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**IDA AYU NUGRAHENI**

**No Induk Mahasiswa: 111628781**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing I



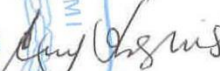
Baldric Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Pembimbing II



Prima Rosita Arini Setyaningsih, SE., M.Si., Ak.


Penguji



Enny Pudjiastuti, Dra., MBA., Ak., CA.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMISKINAN

Ida Ayu Nugraheni, STIE YKPN Yogyakarta, [inugraheni074@gmail.com](mailto:inugraheni074@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Village Funds, Village Fund Allocation, Village Expenditure, Gross Regional Domestic Product, and Total Population on District Poverty in Java Island. The population in this study were all districts in Java, as many as 85 districts. This study uses secondary data in the form of village income and expenditure budget reports, gross regional domestic product reports, population projection reports, and reports on the poverty level of district governments in the Central Bureau of Statistics with a purpose sampling method during the 2015-2018 period. The analytical tool used is multiple linear regression which then tested the hypothesis with the F test, t test, and the coefficient of determination ( $R^2$ ) at an error rate of  $\alpha = 5\%$ . Based on the results of this study it can be concluded that the Village Fund and Village Fund Allocation variables have a positive effect on poverty with the value of each variable of 2.041 for Village Funds and 1,853 for Village Fund Allocation, the Village Expenditure variable has no effect on poverty with a value of -0,926, the variables of Gross Regional Domestic Product and Total Population have a negative effect on poverty with the value of each variable of -1,416 for Gross Regional Domestic Product and -2,644 for Total Population. While the value of the coefficient of determination ( $R^2$ ) is 0,233 or 23,3%. This shows that the variable ability of Village Fund, Village Fund Allocation, Village Expenditure, Gross Regional Domestic Product, and Total Population in explaining poverty is 23,3%.*

*Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation, Village Expenditure, Gross Regional Domestic Product and Poverty.*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan yang terjadi pada suatu negara dapat mengakibatkan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan sumberdaya serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia dalam mencukupi kebutuhan pokok makanan, pakaian, dan tempat tinggal sehingga kemiskinan itu terjadi (Susilowati, 2018). Faktor penyebab kemiskinan diantaranya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi, minimnya penguasaan ilmu teknologi dan pengetahuan, dan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terbatasnya pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi alasan terlaksananya pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan pada masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh daerah tertentu selama satu tahun. Dalam kegiatan ekonomi diperlukan sumber daya alam untuk dikelola menjadi barang dan jasa serta sumber daya manusia/tenaga kerja untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Apabila tenaga kerja mampu mengelola potensi alam yang tepat, maka mampu meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan pada PDRB, akan meningkatkan potensi sumber penerimaan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, faktor kependudukan perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tak terkendalikan dapat menurunkan pertumbuhan perekonomian sehingga dapat memicu adanya kemiskinan. Terbatasnya lapangan pekerjaan berseiringan dengan jumlah penduduk yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah perlu adanya upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Apabila tingkat pendidikan, keadaan lingkungan yang sehat dengan fasilitas kesehatan yang cukup serta jumlah lapangan kerja yang memadai disekitar penduduk cukup dapat mengurangi kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan khususnya pedesaan merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12 Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri atas sekumpulan masyarakat yang mempunyai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wewenang untuk mengurus kepentingannya secara mandiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki peranan dalam membantu proses pembangunan melalui peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya sebagai wujud pencapaian kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus memperhatikan asas akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas setiap hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa pada masyarakat desa sesuai dengan aturan.

Keuangan desa diperoleh dari sumber pendapatan desa, sedangkan aset desa diperoleh dari sumber kekayaan asli desa berupa barang yang dapat dikelola oleh desa, contohnya seperti pemakaian sarana dan prasarana desa mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain yang telah dibangun oleh desa tersebut. Sumber pendapatan desa terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk untuk mengembangkan ekonomi, peningkatan kesejahteraan di masyarakat, dan mengatasi kemiskinan. Tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa dalam menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan serta pengembangan pemberdayaan yang memfokuskan pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan antar desa. Dana desa perlu dikelola secara transparansi dan akuntabel dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan pembangunan dana desa diarahkan untuk mendanai pembangunan desa seperti: jalan desa, jembatan, sambungan air, embung desa, polindes, pasar desa,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAUD, sumur dan drainase/irigasi, sedangkan pelaksanaan pemberdayaan dana desa lebih diarahkan untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pematangan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penganggaran dana untuk kabupaten/kota yang besarnya dihitung 10% dari dana perimbangan. Alokasi dana desa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Pada sisi pengeluaran terdapat Belanja desa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam melaksanakan pembangunan melalui kesepakatan berama. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Belanja Desa merupakan semua biaya untuk kebutuhan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang pembayarannya tidak diterima kembali pada desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 minimum 70% jumlah anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai lima bidang dalam belanja desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana apabila terdapat kebutuhan yang mendesak agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan; kemudian maksimum 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang diperlukan untuk urusan pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dicantumkan sebelumnya, dengan demikian peneliti tertarik mengkaji kemiskinan dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan”**.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah Susilowati (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Hasilnya menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terdapat pengaruh negatif pada Kemiskinan, sedangkan Dana Desa terdapat pengaruh positif pada Kemiskinan.

Penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan” diteliti oleh (Dewi, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Desa terdapat pengaruh positif pada Belanja Desa. Pada variabel Alokasi Dana Desa tidak signifikan pada Belanja Desa. Sedangkan Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa tidak signifikan pada Kemiskinan. Berdasarkan pengaruh total menunjukkan bahwa Belanja Desa bukan variabel intervening antara Pendapatan Desa maupun Alokasi Dana Desa pada Kemiskinan.

Penelitian tentang “Analisis Sebaran dan Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat” diteliti oleh (Hasibuan, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa Jumlah Penduduk terdapat pengaruh positif pada Kemiskinan. Sedangkan pada Tingkat Pendidikan dan Alokasi Dana Desa ada pengaruh negatif pada Kemiskinan.

Relevansi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penganalisisan variabel Belanja Desa. Dalam penelitian Dewi (2018) bahwa Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa (independen) terhadap Belanja Desa (dependen). Sedangkan dalam penelitian ini Belanja Desa (independen) terhadap Kemiskinan (dependen). Selain itu lokasi yang digunakan dalam penelitian juga berbeda, peneliti lebih luas pada kabupaten yang ada di Pulau Jawa karena belum

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terlalu banyak peneliti sebelumnya yang meneliti, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kabupaten di salah satu Provinsi. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu dapat menunjukkan bahwa kemampuan variabel faktor-faktor yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk dapat menjelaskan tingkat Kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis (analisis), teori, dan hipotesis yang kemudian diolah dan dianalisis. Jumlah data populasi sebanyak 85 kabupaten di Pulau Jawa diambil 80 kabupaten di Pulau Jawa sebagai sampel yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti yaitu terdapat Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Kemiskinan dan terdapat 5 data kabupaten di pulau Jawa yang tidak sesuai dengan kriteria yang diteliti.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk dan variabel dependennya adalah Kemiskinan. Sedangkan jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2015-2018 sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data *time series* 2015-2018. Berikut ini rumus persamaan model regresi:

$$\text{Kemiskinan} = a + b_1 \text{ DD} - b_2 \text{ ADD} - b_3 \text{ BD} - b_4 \text{ PDRB} - b_5 \text{ JP} + e$$



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan pada persamaan diatas untuk Kemiskinan adalah variabel dependen, DD adalah Dana Desa, ADD adalah Alokasi Dana Desa, BD adalah Belanja Desa, PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto, JP adalah Jumlah Penduduk,  $\alpha$  adalah Nilai Kemiskinan bila DD, ADD, BD, PDRB, dan JP sama dengan 0 (konstan),  $\beta$  adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan  $e$  adalah *error term*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 80 kabupaten di Pulau Jawa sebagai sampel dan data *time series* selama 4 tahun yaitu tahun 2015-2018. Dari analisis deskriptif ini diperoleh hasil:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

<i>Variable</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
DD	Rp12.191.192.000,00	Rp488.434.210.000,00	Rp220.032.488.978,00	Rp83.750.583.963,00
ADD	Rp138.739.088,00	Rp313.570.879.000,00	Rp115.251.542.957	Rp37.117.731.610
BD	Rp45.264.025.300,00	Rp992.468.720.000,00	Rp374.782.856.354	Rp150.332.295.731
PDRB	Rp6.271.000.000,00	Rp242.023.000.000,00	Rp33.238.659.375	Rp35.058.860.002
JP	127.702	5.840.907	1.282.951	744.548
Kemiskinan	4,30	22,57	12,38	3,70

Sumber: data diolah, 2020

Hasil analisis deskriptif pada variabel DD yaitu Dana Desa memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar Rp12.191.192.000,00 pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Nilai tertinggi (*maximum*) DD sebesar Rp488.434.210.000,00 pada Kabupaten Bogor tahun 2015. Nilai rata-rata (*mean*) DD sebesar Rp220.032.488.978,00 dan nilai standar

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

deviasi (*std. deviation*) DD sebesar Rp83.750.583.963,00. Variabel ADD yaitu Alokasi Dana Desa memiliki nilai terendah sebesar Rp138.739.088,00 pada Kabupaten Pasuruan tahun 2016. Nilai tertinggi ADD sebesar Rp313.570.879.000,00 pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2015. Nilai rata-rata ADD sebesar Rp115.251.542.957,00 dan nilai standar deviasinya sebesar Rp37.117.731.610,00.

Variabel BD yaitu Belanja Desa memiliki nilai terendah sebesar Rp45.264.025.300,00 pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2016. Nilai tertinggi BD sebesar Rp992.468.720.000,00 pada Kabupaten Bogor tahun 2017. Nilai rata-rata BD sebesar Rp374.782.856.354,00 dan nilai standar deviasinya sebesar Rp150.332.295.731,00. Variabel PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai terendah sebesar Rp6.271.000.000,00 pada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Nilai tertinggi PDRB sebesar Rp242.023.000.000,00 pada Kabupaten Bekasi tahun 2018. Nilai rata-rata PDRB sebesar Rp33.238.659.375.683,00 dan nilai standar deviasinya sebesar Rp35.058.860.002,00. Variabel JP yaitu Jumlah Penduduk memiliki nilai terendah sebesar 127.702 jiwa pada Kabupaten Gresik tahun 2016. Nilai tertinggi JP sebesar 5.840.907 jiwa pada Kabupaten Bogor tahun 2018. Nilai rata-rata JP sebesar 1.282.951 jiwa dan nilai standar deviasinya sebesar 744.548 jiwa. Variabel Kemiskinan memiliki nilai terendah sebesar 4,30% pada Kabupaten Serang tahun 2018. Nilai tertinggi Kemiskinan sebesar 22,57% pada Kabupaten Bangkalan tahun 2015. Nilai rata-rata Kemiskinan sebesar 12,45% dan nilai standar deviasinya sebesar 3,91%.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik ini menggunakan 80 Kabupaten di Pulau Jawa sebagai sampel selama tahun 2015-2018. Pengujian asumsi klasik harus dipenuhi dahulu sebelum

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Data dalam pengujian asumsi klasik telah ditransformasi kedalam bentuk *Logaritma Natural* (LN) karena terdapat perbedaan satuan yaitu pada variabel jumlah penduduk. Berikut ini hasil analisis untuk pengujian asumsi klasik.

## 2.1 Uji Normalitas

Penganalisisan data dalam statistika parametrik adalah data harus berdistribusi normal.

Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) dengan tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Berikut hasil dari uji normalitas:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov Z***

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	320
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,299
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,068

Sumber: data diolah, 2020

Hasil perhitungan pada tabel 2.1 jumlah data sebanyak 320 hasil nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) sebesar 1,299 dan nilai Sign sebesar 0,068  $> 0,05$ . Dengan demikian kesimpulan dalam pengujian ini adalah data berdistribusi normal, maka  $H_0$  diterima.

## 2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mensyaratkan tidak ada korelasi diantara variabel independen.

Model regresi yang baik terbebas dari multikolinearitas dengan nilai *Tolerance*  $> 0,10$

dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . Berikut hasil dari uji multikolinearitas:

**Tabel 2.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
DD	0,670	1,494	Terbebas dari multikolinearitas

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ADD	0,462	2,165	Terbebas dari multikolinearitas
BD	0,451	2,220	Terbebas dari multikolinearitas
PDRB	0,548	1,826	Terbebas dari multikolinearitas
JP	0,422	2,369	Terbebas dari multikolinearitas

Sumber: data diolah, 2020

Hasil perhitungan pada tabel 2.2 nilai *Tolerance* setiap variabel pada Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa (BD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (JP)  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ . Dengan demikian kesimpulan dalam pengujian ini data terbebas dari multikolinearitas, maka  $H_0$  diterima.

### 2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi diperlukan untuk membuktikan ada tidaknya korelasi dalam suatu nilai variabel yang diamati dari waktu ke waktu. Model regresi yang baik apabila terbebas dari autokorelasi. Pada pengujian ini digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Berikut adalah hasil dari uji *Durbin-Watson*.

**Tabel 2.3**  
**Hasil Uji *Durbin-Watson***

Nilai Statistik <i>Durbin-Watson</i>	Kesimpulan
$1,785 \leq 1,800 \leq 1,848$	Tanpa Keputusan

Sumber: data diolah, 2020

Hasil perhitungan pada tabel 2.3 nilai uji *Durbin-Watson* sebesar 1,800. Dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai dL sebesar 1,785 dan nilai dU sebesar 1,848 sehingga hasilnya tanpa keputusan (Ghozali, 2011).

Pada tabel 2.3 terlihat tidak ada keputusan sehingga perlu dilakukan uji *runs test* untuk memastikan apakah data terdapat masalah autokorelasi pada pengujian *Durbin-Watson*. Hasil uji *Run Test* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 2.4**  
**Hasil Uji *Runs Test***

	<i>Unstandadized Residual</i>
N	320
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,073

Sumber: data yang diolah, 2020

Hasil perhitungan pada tabel 2.4 data sebanyak 320 diperoleh nilai signifikansinya sebesar  $0,073 > 0,05$  yang menyatakan bahwa residual regresi estimasi adalah random sehingga data tidak terdapat masalah autokorelasi, maka  $H_0$  diterima.

## 2.4 Uji Heteroskedastisitas

Untuk memastikan dalam regresi estimasi memiliki varians residul antara satu pengamatan ke pengamatan lain berubah maka diperlukan pengujian ini (Ghozali, 2011). Hasil regresi yang baik terbebas dari Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Hasil Uji *Glejser***

Variabel	<i>Sig.</i>	Kesimpulan
DD	0,882	Terbebas dari Heteroskedastisitas
ADD	0,210	Terbebas dari Heteroskedastisitas
BD	0,063	Terbebas dari Heteroskedastisitas
PDRB	0,921	Terbebas dari Heteroskedastisitas
JP	0,063	Terbebas dari Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah, 2020

Hasil perhitungan pada tabel 2.5 variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa (BD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (JP) nilai signifikansinya  $> 0,05$  terhadap nilai absolut residual sehingga data terbebas dari heteroskedastisitas, maka  $H_0$  diterima.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat adanya hubungan antara variabel independen yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa (BD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (JP) dan variabel dependen yaitu Kemiskinan. Data telah ditransformasi kedalam bentuk *Logaritma Natural* (LN) karena terdapat perbedaan satuan pada variabel jumlah penduduk dan jumlah rupiah. Hasil dari pengujian analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	Sig.	Prediksi	Temuan	Kesimpulan
(Constant)	18,172	0,120			
DD	2,041	0,000	+	+	Diterima
ADD	1,853	0,024	-	+	Ditolak
BD	-0,926	0,168	-	-	Diterima
PDRB	-1,416	0,000	-	-	Diterima
JP	-2,644	0,000	-	-	Diterima

Sumber: data diolah, 2020

Hasil perhitungan pada tabel 3.1 hubungan persamaan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 18,172 + 2,041\text{DD} + 1,853\text{ADD} - 0,926\text{BD} - 1,416\text{PDRB} - 2,644\text{JP} + e$$

### 3.1 Uji Parsial (uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji signifikansi individual parameter hasil estimasi. Hasil perhitungan pada tabel 3.1 diperoleh hasil persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

konstanta sebesar 18,172 artinya DD, ADD, BD, BM, PDRB, dan JP  $\neq 0$  maka tidak signifikan terhadap kemiskinan sebesar 18,172 satu satuan. Hasil koefisien regresi nilai Dana Desa (DD) sebanyak 2,041 yang memperlihatkan pengaruh positif pada kemiskinan, artinya setiap peningkatan 0,01 DD maka akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 2,041. Hasil signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka keputusannya  $H_0$  ditolak.

Nilai koefisiensi regresi Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 1,853 memperlihatkan pengaruh positif pada kemiskinan artinya setiap peningkatan 0,01 ADD akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 1,853, maka  $H_0$  ditolak.. Hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan hipotesis karena data yang didapat tidak berhasil membuktikan hipotesis dan arah pengaruh dalam hasil olah data tidak sesuai dengan harapan hipotesis. Hasil signifikansinya  $0,024 < 0,05$  maka keputusannya  $H_0$  ditolak.

Koefisien regresi Belanja Desa (BD) memperlihatkan tidak adanya pengaruh pada kemiskinan terlihat nilai koefisiennya sebanyak -0,926, artinya setiap penurunan 0,01 belanja desa tidak berpengaruh untuk menurunkan kemiskinan sebanyak 0,926. Nilai signifikansinya  $0,168 > 0,05$ , maka keputusannya  $H_0$  diterima.

Nilai koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memperlihatkan pengaruh negatif pada kemiskinan sebanyak -1,416, artinya setiap penambahan 0,01 PDRB akan menurunkan kemiskinan sebanyak 1,416. Nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , maka keputusannya  $H_0$  ditolak.

Koefisiensi regresi Jumlah Penduduk (JP) memperlihatkan pengaruh negatif pada kemiskinan sebanyak -2,644, artinya setiap penambahan 0,01 pada jumlah penduduk akan menurunkan kemiskinan sebanyak 2,644. Nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , maka keputusannya  $H_0$  ditolak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 3.2 Uji Simultan (uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji signifikansi parameter secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa (BD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan. Berikut adalah hasil dari uji F.

**Tabel 3.2**

### Hasil Uji F

F	Sig. F
19,057	0,000

Sumber: data diolah, 2020

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $F_{kritis} = 2,21$  dengan  $F_{hitung} = 19,057$ , karena  $F_{hitung} = 19,057 > F_{kritis} = 2,21$  dengan nilai signifikansi  $F 0,000 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak maka setidaknya terdapat salah satu variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen.

## 3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Algifari (2015) uji  $R^2$  digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauhmana variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut hasil pengujian  $R^2$ :

**Tabel 3.3**

### Hasil Uji $R^2$

R	$R^2$
0,482	0,233

Sumber: data diolah, 2020



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil perhitungan pada tabel 4.10  $R^2$  sebesar 0,233. Dengan demikian pengaruh semua variabel independen terhadap perubahan nilai variabel dependen sebanyak 23,3%, sisanya 76,7% dipengaruhi variabel lain selain variabel independen yang digunakan.

## **Pembahasan**

**Dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan.** Pemberian dana desa merupakan bentuk dari kewenangan desa agar dikelola untuk mengentaskan kemiskinan. Dana desa di prioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat. Tercapainya pembangunan diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi langsung dari masyarakat itu sendiri dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan terhadap hasil pembangunan. Pemberdayaan pada masyarakat dapat mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Susilowati (2017) dan Handayani (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa lebih diutamakan untuk pembangunan saja sehingga kemampuan perencanaan dan pengelolaan dananya masih minim serta rendahnya pada pemberdayaan pada masyarakat. Dengan demikian pemerintah dalam merealisasikan dana desa belum sesuai target sehingga pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan dikatakan tidak berhasil. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat tidak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara langsung dan peran pemerintah dalam mengelola dananya tidak akuntabel dan transparan sehingga menyebabkan program-program pemerintah belum seutuhnya tercapai. Maka dengan penambahan dana desa tidak selalu dapat menurunkan kemiskinan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Alokasi dana desa berpengaruh positif kemiskinan.** Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa dikucurkan untuk proses pembangunan dan peningkatan layanan di masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tersebut diperlukan pemberdayaan masyarakat yang cukup. Namun pada penelitian ini penambahan alokasi dana desa berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan, hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan pencapaian pembangunan harus segera diselesaikan. Penelitian ini juga sejalan dengan Inayatsyah (2019) yang menyatakan setiap penambahan alokasi dana desa masih diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan saja sehingga belum memberikan dampak secara langsung pada penurunan kemiskinan. Hal ini bisa saja terjadi karena perencanaan program pada alokasi dana desa belum mempengaruhi keberhasilan program dalam menurunkan kemiskinan serta kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan begitu, alokasi dana desa memungkinkan belum dapat meningkatkan pembangunan dan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam proses pembangunan sehingga alokasi dana desa pada Kabupaten di Pulau Jawa tidak selalu dapat menurunkan kemiskinan.

**Belanja desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.** Belanja desa merupakan pengeluaran desa yang disesuaikan dengan pendapatan desa dan kebutuhan desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa perealisasi dana untuk belanja desa memang dialokasikan sesuai kebutuhan desa namun realisasi dana dalam belanja desa belum cukup berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini kemungkinan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat terjadi karena dana yang dikeluarkan untuk belanja sebagian besar hanya untuk belanja pembangunan, disisi lain belanja desa tidak hanya untuk pembangunan saja tetapi pengembangan terhadap pemberdayaan juga perlu dilakukan. Sejalan dengan Yuniza (2020) yang menyatakan pengeluaran desa untuk pembangunan sudah efektif, namun belum terlalu efektif untuk menurunkan kemiskinan karena untuk mengentaskan kemiskinan perlu adanya belanja desa yang dialokasikan sesuai keperluan desa mereka. Desa tidak bisa begitu saja membelanjakan sebagian besar anggarannya untuk infrastruktur pembangunan, tetapi juga untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

**Produk domestik regional bruto negatif terhadap kemiskinan.** Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan. PDRB merupakan kegiatan perekonomian dalam masyarakat untuk memperoleh nilai tambah barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. PDRB dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota dilihat dari besarnya penerimaan PDRB yang diperoleh. Apabila penerimaan PDRB meningkat dan angka kemiskinan menurun maka pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Penelitian ini sejalan dengan Nabila (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB merupakan keberhasilan menurunnya angka kemiskinan. Peningkatan PDRB maka kesejahteraan pada masyarakat akan meningkat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi PDRB akan semakin besar sumber penerimaan daerah tersebut (Susilowati, 2018). Dalam hal ini PDRB menggambarkan bagaimana masyarakat mampu mengelola potensi yang dimilikinya guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan langsung oleh

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat dengan begitu peningkatan pada PDRB dapat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan.

**Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.** Hasil hipotesis ini menunjukkan jumlah penduduk dapat menurunkan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk dengan usia produktif yang terampil dan kompeten dalam bekerja mampu menambah penerimaan dan dapat mengurangi kemiskinan daerah tersebut. Dalam hal ini, penduduk adalah sumber daya manusia yang harus diberdayakan dengan baik sehingga penambahan penduduk tidak menyebabkan kemiskinan menjadi meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan Silastri (2017) yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kemiskinan akan menurun yang mana jumlah penduduk ini lebih banyak berusia produktif sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah penduduk disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat maka tujuan pembangunan ekonomi akan tercapai, sehingga kemiskinan dapat diatasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada penelitian ini diperoleh hasil variabel independen yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (DD), Belanja Desa (BD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan. Berikut hasil kesimpulan dari penelitian ini:

1. Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kemiskinan;
2. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kemiskinan;
3. Belanja Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan;

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan;
5. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pada penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan untuk pemerintah dan peneliti selanjutnya yaitu Pemerintah kabupaten perlu memperhatikan pengelolaan dana baik dana desa dan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparansi berdasarkan potensi yang dimiliki agar tercapai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu juga dengan belanja desa seharusnya lebih diutamakan pada kebutuhan sehingga pemerintah dapat melihat seperti apa program yang perlu dijalankan dengan mengevaluasi program atau memperbaiki program yang telah dievaluasi melalui analisis dan pengumpulan data sebelum menjalankan pembangunan. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalam dengan data tahun terkini seperti data tahun 2019.



## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2015). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2015). Data Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi 2010-2020.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2015). Data Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2015-2018.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2015). Definisi Produk Domestik Regional Bruto.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan. *Kitabah* , 2 (1), 87-101.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* , 5 (2), 50-58.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu* , 6 (1), 102-117.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah* , 1-16.
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran dan Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 79-91.
- Hidayat, A. (2012). *Statistikian*. Retrieved Juni 22, 2020, from Statistikian: [www.statistikian.com](http://www.statistikian.com)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Inayatsyah, B., & Zulham, T. (2019). Evaluasi dan Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4 (2), 175-183.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of financial Economics* 3 (4), 305-360.
- Kawulur, S., Koleangan, R. A., & Wauran, P. C. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19 (03), 107-117.
- Kotambunan, L. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014). *Efisiensi*, 16 (1).
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (04), 62-72.
- Lendentariang, D., Engka, D. S., & Tolosang, K. D. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19 (02), 23-34.
- Nabila, H. A. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*, 1-14.
- Penyaluran Dana Desa 2015-2018 Total Seluruh Indonesia dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-des-a-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>. Diakses 13 Agustus 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2), 51-61.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9 (3), 287-295.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomika Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15 (01), 35-49.
- Setianingsih, I. (2016). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Melawi. 1-18.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Silastri, N. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fekon*, 4 (1), 105-117.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sunu, M. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 843-872.
- Susilowati, N. I., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1 (2), 189-202.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyudi, R., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2014). Analisis Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2 (3), 49-59.
- Wahyuningsih, Y. E., & Zamzami. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomika dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1 (1), 39-47.
- Wati, E., & Sadjarto, A. (2019). Pengaruh Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 156-166.
- Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12 (1), 37-50.
- Yuniza, M. E., Jibril, M., & Nashih, F. M. (2020). Village Fund As Poverty Countermeasures In Indonesia: Case Study of Village Expenditure In Central Java. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8 (3), 104-113.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yustie, R., & Heriqbaldi, U. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (1), 7-16.

